

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 76/G/2021/PTUN.JKT.

B. Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Basah, Sjachrah. *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1989.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Elpah, Dani, dkk. *Titik Singgung Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pertanahan*. Bogor: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, 2014.
- Hadjon, Philipus M, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Iqbal, Moch. *Implikasi Putusan Sengketa Pertanahan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.
- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

- Mahkamah Agung RI. *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Marbun S.F., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- M, Abdullah, Ali. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2022.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: CV Manhaji, 2016.
- Sasmito, Hery Abduh. *Urgensi Pembentukan Pengadilan Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Siallagan, Haposan, dkk. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK), 2019.
- Simanjutak, Enrico. *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No. 30 Tahun 2014*. Jakarta: Genta Press, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2022.

- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Filosofi, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yudisial, Komisi. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2024.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

C. Jurnal

Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak dalam Sistem Pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 1 (2019).

Blegur, Spyendik Bernadus. “Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Peratun* 5, no.1 (Februari, 2022).

Fahmianto, Mochamad Reza. “Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara.” Paper 3 Pengadilan Negeri Sumedang.

Jayadi, Hendri, dkk. “Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia.” *Jurnal Comunita Servizio* 5, no. 1 (April, 2023).

Nurdzakiyyah, Atikah, Eka Detik Nurwagita, Galuh Putri Maharani. “Penghapusan Pasal 22 Undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi,” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 2 (November, 2022).

Putrijanti, Aju. “Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober, 2015).

Shabrina, Tita. “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT).” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (Oktober, 2020).

Wahyunadi, Yodi Martono. “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (Maret, 2016).

D. Sumber Lainnya

Siti Zubaidah, *Memaknai “Freedom of Judge” dalam Kewenangan Hakim*, Oktober 2019 Diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenangan-hakim-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-3-10> diakses pada 5 Januari 2025.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

